

**PERANAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL  
PADA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA**

Oleh :

**T R I Y O N O, SH.**

**NIP 132 086 658**

**Makalah disampaikan pada diskusi Bagian Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Bulan Pebruari 1996**

## PERANAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PADA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA

---

### I. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan arus informasi yang semakin pesat membawa konsekuensi semakin cepatnya perubahan situasi dan kondisi. Arus informasi yang datang dari berbagai belahan dunia yang begitu mudah diterima di berbagai belahan dunia yang lain, mau tidak mau akan membawa akibat terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Masyarakat yang menerima informasi dari belahan dunia yang lain akan mencoba membandingkannya dengan pola perilaku dan sikap yang sudah berlaku sehari-hari.

Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap kedua yang telah memasuki tahun kedua Pelita VI, khususnya di bidang hukum diharapkan bahkan harus mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan sebagai akibat dari lajunya arus informasi yang begitu gencar.

Pada Seminar Hukum Nasional VI tahun 1994 telah dirumuskan pentahapan lima tahunan pembangunan hukum pada Pembangunan Jangka Panjang Kedua, yaitu : (*Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, 1996 : 1*)

- a. Pelita VI : tahap "persiapan";
- b. Pelita VII : tahap "penataan (kembali)";
- c. Pelita VIII : tahap "evaluasi";
- d. Pelita IX : tahap "penyempurnaan"; dan
- e. Pelita X : tahap "pemantapan".

Pentahapan yang demikian ini tidak bisa dilepaskan dari sasaran akhir Pembangunan Jangka Panjang Kedua di bidang pembangunan hukum, yaitu "terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan mantapnya wibawa/penegakan hukum dalam menunjang pembangunan nasional".

Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN, yang telah dijabarkan dalam Keputusan Presiden No. 17 tahun 1994 tentang Repelita VI, dinyatakan bahwa pembangunan hukum menjadi satu bidang tersendiri, yang mempunyai posisi sejajar dengan bidang lainnya. Suatu peningkatan bahwa hukum yang pada Pelita sebelumnya hanya merupakan bagian dari bidang, namun pada Pelita VI ini telah mendapatkan tempat tersendiri sebagai bidang yang sejajar dengan bidang lainnya.

Dalam Pembangunan Hukum Nasional, Hukum adat mendapatkan tempat yang sangat istimewa, seperti telah dicantumkan dalam Tap MPRS No II/MPRS/1960 yang secara garis besar menentukan bahwa Pembinaan Hukum Nasional agar berlandaskan pada Hukum Adat yang sesuai dengan perkembangan kesadaran rakyat Indonesia dan tidak menghambat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Ketetapan MPRS tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa hukum adat mempunyai posisi sentral yang harus diperhatikan dalam rangka pembangunan hukum nasional. Hukum adat yang bisa dijadikan landasan hukum nasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (*IGN. Sugangga, 1994 : 46*)

1. Hukum Adat yang tidak bertentangan dengan persatuan dan kesatuan Bangsa.
2. Hukum Adat yang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.
3. Hukum Adat yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang (Hukum Tertulis)
4. Hukum Adat yang harus memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan unsur-unsur agama.
5. Hukum Adat yang bersih dari sifat-sifat feodalisme, kapitalisme, serta penghisapan manusia atas manusia.

Syarat-syarat tersebut di atas dimaksudkan agar hukum nasional yang bersumber dari hukum adat dapat selalu mengikuti perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan segala aspek kehidupan masyarakat.

## II. PERMASALAHAN

Bertolak dari kenyataan tersebut di atas, bahwa perkembangan masyarakat semakin mengarah ke pola kehidupan yang semakin mengharapkan pembaruan khususnya di bidang hukum demi mendapatkan pelayanan keadilan, maka dalam makalah ini akan dibahas beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah kedudukan Hukum Adat dewasa ini;
2. Bagaimana pula peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional pada Pembangunan Nasional Jangka Panjang Kedua ;

### III. PEMBAHASAN

#### **A. Kedudukan Hukum Adat Dewasa Ini**

Membicarakan hukum adat dewasa ini, tentu saja tidak bisa dilepaskan begitu saja dari sejarah perkembangan hukum adat itu sendiri hingga sekarang. Pada mulanya, sejak jaman penjajahan Belanda, meskipun di sana-sini banyak dilaksanakan aturan-aturan yang berasal dari budaya asli bangsa Indonesia atau lebih dikenal dengan hukum adat, akan tetapi oleh penjajah Belanda hal ini dianggap tidak bisa menunjang kepentingan penjajah.

Dimulai sejak Belanda memberlakukan politik perdagangan yang lebih dikenal dengan VOC. Pada jaman VOC ini hukum adat tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah penguasa VOC. Hal ini disebabkan karena VOC merupakan suatu organisasi perdagangan, sehingga yang menjadi tujuan utama adalah mencari keuntungan semata. Hanya saja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di atas kapal-kapal VOC, diberlakukan aturan-aturan yang khusus berlaku di atas kapal-kapal VOC tersebut. (*Prof. Dr. R. Soepomo, SH, 1989 : 4*)

Perkembangan selanjutnya, karena sering terjadi masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan aturan-aturan yang sudah ada, maka oleh pemerintah Belanda, penguasa VOC diberi kekuasaan dan keleluasaan untuk membuat aturan-aturan baru yang bisa diberlakukan di atas kapal-kapal VOC dan juga di wilayah-wilayah kekuasaan VOC. Sebagai contoh hasil dari produk penguasa VOC setelah mendapatkan

kekuasaan untuk membuat aturan sendiri, adalah yang berlaku di wilayah Cirebon. Pada masa kekuasaan **Residen Hasselaer**, saat itu disusun suatu kitab hukum adat yang akan diberlakukan di wilayah Cirebon. Kitab ini diharapkan menjadi pusat pedoman hakim-hakim di wilayah Cirebon. Kitab ini lebih dikenal dengan nama **"Perpakem Cirebon"**. (IGN. Suganga, SH, 1994 : 32)

### **1. Masa Penjajahan Belanda**

Pada masa penjajahan Belanda, masalah hukum juga tidak mendapatkan perhatian yang utama. Belanda lebih mementingkan usaha untuk menguasai negara Indonesia. Apalagi kalau hukum adat dirasa tidak mendukung usahanya untuk melancarkan politik pemerintahannya.

Bahkan ada 6 kali usaha percobaan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk merubah, mengganti, bahkan menghapuskan hukum adat, untuk selanjutnya akan diganti dengan sistem hukum barat (baca: Belanda). Akan tetapi usaha ini selalu gagal. Hal ini karena selain tidak mendapatkan sambutan dari masyarakat hukum adat, juga ditentang oleh para ahli hukum Belanda sendiri. Salah satu tokoh Hukum Belanda yang dengan gigih mempertahankan keberadaan hukum adat adalah seorang Guru Besar Hukum di Universitas Leiden, yang bernama Prof. C. Van Vollenhoven. Tokoh ini dengan gigihnya mempertahankan hukum adat dari usaha-usaha pemerintah Belanda yang akan merubah, mengganti, atau pun menghapuskannya.

Baru kemudian pada tahun 1929 usaha Van Vollenhoven

ini mendapatkan hasil yaitu dimasukkannya masalah hukum adat ini ke dalam suatu aturan yang disebut **Indische Staats-regeling (IS)**.

Pasal 163 IS memuat aturan perbedaan golongan penduduk. Dalam pasal tersebut penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi 3 (tiga) golongan penduduk. (*IGN. Suganga, SH, 1994 : 38*)

1. Golongan Eropa.

Termasuk golongan ini adalah orang-orang Eropa dan keturunannya, juga orang yang disamakan dengan mereka, termasuk diantaranya adalah orang-orang Jepang.

2. Golongan Timur Asing.

Termasuk golongan ini adalah orang-orang Asia non Jepang, yang dianggap asing oleh penduduk Indonesia.

3. Golongan Bumi Putra.

Golongan ini adalah orang-orang Indonesia Asli.

Kemudian hukum apa yang diberlakukan terhadap mereka, selanjutnya dalam pasal 131 ayat 2 diatur sebagai berikut:

Untuk Golongan Eropa diberlakukan hukum perdata Eropa dengan asas Konkordansi. Maksudnya Hukum perdata Eropa diberlakukan terhadap orang-orang Eropa yang di Indonesia dengan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

Terhadap golongan Timur Asing dan Bumi Putra, hukum apa yang akan diberlakukan, oleh IS juga sudah diatur, yaitu dalam pasal 131 ayat 2 a yang menentukan bahwa

untuk Golongan Timur Asing dan Bumi Putra akan dibuatkan aturan hukum perdata yang akan berlaku secara nasional.

Selanjutnya sambil menunggu selesainya pembuatan peraturan tersebut dalam pasal 131 ayat 6 diatur sebagai berikut :

Untuk golongan Timur Asing dan Bumi Putra berlaku hukum adatnya sendiri-sendiri yang sudah berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, untuk Golongan Timur Asing berlaku hukum adat negaranya sendiri-sendiri, sebagai contoh; untuk golongan Tionghoa, Arab, India, dan lainnya berlaku hukum adat negaranya sendiri-sendiri yang sudah lazim berlaku di Indonesia, dan untuk golongan Bumi Putra berlaku hukum adat Indonesia.

## **2. Masa Pendudukan Jepang.**

Pada jaman pendudukan Jepang, Masalah hukum juga tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah pendudukan Jepang. Hal ini karena tujuan utama dari pemerintah Pendudukan Jepang adalah untuk mengusir Belanda dari Indonesia sebagai upaya dalam memenangkan perang Asia Timur Raya.

Dengan semboyannya yang dikenal dengan "3A", yaitu Jepang adalah Cahaya Asia, Jepang adalah Pelindung Asia, dan Jepang adalah Saudara Tua Asia, Balatentara Jepang dapat mengusir Belanda dari Bumi Indonesia.

Karena tujuannya hanya untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya, maka yang dikirim ke Indonesia pun hanya



tentara-tentara, yang terhadap masalah yang lain selain perang tidak begitu diperhatikan. Termasuk didalamnya adalah masalah hukum.

Hanya saja untuk mengisi ke-vacum-an di bidang hukum, oleh pemerintah pendudukan Jepang dikeluarkan satu aturan perundang-undangan yaitu UU No. 1 Tahun 1942, yang dinamakan dengan **Undang-Undang Bala Tentara Dai Nipon.** (*IGN. Suganga, SH, Materi Kuliah Hukum Adat I, tahun 1988*)

Undang-undang ini pada prinsipnya hanya mengatur masalah peraturan peralihan yang menyatakan bahwa aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah militer pendudukan Jepang.

Dalam salah satu pasalnya undang-undang ini yaitu pasal 3 menyatakan :

"Segala badan negara dan aturan yang sudah ada masih tetap berlaku selama tidak bertentang dengan kepentingan pemerintah militer Bala Tentara Jepang".

Dengan demikian selama dalam pendudukan Jepang hanya dikeluarkan satu aturan saja yang pada intinya hanya mengatur masih diberlakukannya aturan-aturan yang sudah ada. Sehingga aturan-aturan dalam **Indische Staatsregeling** masih tetap berlaku.

## **Masa Kemerdekaan Indonesia**

### **1. Masa Undang Undang Dasar 1945**

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia memproklamlirkan kemerdekaannya, yang berarti bangsa Indonesia telah berdiri menjadi suatu negara yang bebas menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah hasil perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah.

Setelah Indonesia merdeka, sehari kemudian yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) disyahkan UUD 1945, yang merupakan hukum dasar setelah Indonesia merdeka. Kemudian bagaimana dengan kedudukan hukum adat setelah berlakunya UUD 1945 tersebut ?

Dalam Undang-undang Dasar 1945 tersebut tidak satu pasal pun yang menyebut istilah hukum adat, hanya saja kalau kita perhatikan, bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, yang terdiri dari 16 Bab, 37 pasal, 2 pasal Aturan Peralihan dan 4 ayat Aturan Tambahan, serta dengan Penjelasannya.

Dalam pasal II Aturan Perlihan UUD 1945 tersebut diatur, bahwa sebelum ada aturan baru berdasarkan UUD ini, maka badan negara dan aturan-aturan yang sudah ada tetap dianggap sah berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD ini.

## 2. Masa Konstitusi RIS

Tanggal 27 Desember 1949 Negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini hukum dasar yang berlaku adalah Konstitusi RIS. Pada masa ini Hukum Adat tetap dianggap berlaku sah. Dalam pasal 192 ayat 1 Konstitusi RIS ini mengatur aturan peralihan, yang pada prinsipnya adalah memberlakukan aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga hukum adat pun masih tetap dianggap berlaku. Bahkan hukum adat justru diatur secara eksplisit dalam Konstitusi RIS ini, yakni dalam pasal 146 ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut :

"Segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar dari hukuman itu."

Dengan demikian dalam Konstitusi RIS ini secara tegas menunjuk hukum adat dan memberikan perintah kepada hakim, agar dalam memberi putusan maupun menjatuhkan hukuman disamping menggunakan menggunakan undang-undang (tertulis juga harus menggunakan hukum adat. (*IGN. Suganga, SH, 1994 : 44*)

## 3. Masa UUDS 1950

Negara Indonesia Serikat hanya berlangsung kurang lebih 8 (delapan) bulan. Pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Indonesia Serikat berubah kembali menjadi Republik Indonesia Kesatuan. Dengan demikian Konstitusi RIS diganti diganti dengan UUD Sementara 1950. Dikatakan sementara karena UUD

ini dimaksudkan untuk sementara waktu yang untuk kemudian akan diganti dengan UUD yang permanen. Oleh karena itu Badan Konstituante disertai tugas untuk membuat UUD yang permanen tersebut.

Dalam UUDS 1950 tersebut kedudukan hukum adat juga mendapatkan tempat yang sangat pasti. Hal ini bisa terlihat dalam pasal 142 UUDS 1950 yang merupakan aturan peralihan, yang pada intinya menetapkan bahwa peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang telah ada pada tanggal mulai berlakunya UUDS ini masih tetap berlaku.

Hukum Adat pun mendapatkan pengaturan yang pasti dalam UUDS 1950 ini, yakni dalam pasal 104 ayat 1 UUDS, yang menyatakan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang menjadi dasar dari hukuman itu. (*Prof. Imam Sudiyat, SH, 1978 : 23*)

#### **4. Masa UUD 1945 (Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959)**

Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebagai akibat dari tidak berhasilnya Badan Konstituante untuk menyusun UUD yang baru, maka UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali. Dengan demikian berarti pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan aturan yang sudah ada tetap dianggap berlaku selama belum dirubah menurut UUD ini, menjadi hukum positif. Artinya aturan ini menjadi hukum yang berlaku ada saat ini.

Dengan demikian maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 131 IS ayat 2 b jo. pasal 131 ayat 6, jo pasal 192 ayat 1 Konstitusi RIS, jo pasal 146 ayat 1 Konstitusi RIS, jo pasal 142 UUDS jo pasal 104 UUDS menjadi hukum yang berlaku dengan adanya pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. (*Hilman Hadikusumah, SH, 1980 : 132*)

## **II. Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional pada Pembangunan Jangka Panjang Kedua**

Prof.Dr.R. Soepomo,SH, dalam bukunya "Bab-Bab Tentang Hukum Adat" menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itu melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sehingga hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup manusia itu sendiri. (*Prof.Dr. Soepomo, SH, 1989 : 3*)

Memperhatikan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang selalu ada dan berlaku di setiap masyarakat, karena merupakan hukum yang hidup, yang berarti selalu mengikuti perkembangan masyarakatnya.

Selanjutnya dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional telah mengambil kesimpulan mengenai kedudukan dan peranan hukum adat, antara lain :

1. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional, yang menuju kepada unifikasi hukum dan yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuhnya dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum.
2. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional, pada dasarnya berarti :
  - a. penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan masa mendatang, dalam rangka membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  - b. menggunakan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesiannya.
  - c. memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum ke dalam lembaga-lembaga hukum baru, lembaga-lembaga dari hukum asing dipergunakan untuk memperkaya dan memperkembangkan hukum nasional, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
3. Di dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional, hukum adat merupakan salah satu unsur, sedangkan di dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan nasional, merupakan intinya

4. Dengan terbentuknya hukum nasional yang mengandung unsur-unsur hukum adat, maka kedudukan dan peranan hukum adat itu telah terserap ke dalam hukum nasional. (*Soleman B. Taneko, SH, 1987 : 112-113*).

Keberadaan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional memang sempat menjadi polemik antara para ahli hukum sendiri. Beberapa sarjana menganggap bahwa hukum adat sudah tidak mendapatkan tempat lagi dalam pembangunan hukum di Indonesia, dengan alasan sehubungan dengan kompleksnya masalah yang diatur oleh hukum sedangkan hukum adat hanya bersifat lokal. Akan tetapi banyak pula yang beranggapan bahwa hukum adat harus dipertahankan untuk menunjang pembangunan hukum di Indonesia.

Perlu kiranya diperhatikan apa yang dikatakan oleh Soekanto, yang menyatakan bahwa hukum adat adalah faset dari kebudayaan nasional kita. Kita harus bangga mempunyai suatu hukum yang asli sendiri, suatu hukum yang harus kita pertahankan. (*Soleman B. Taneko, SH, 1987 : 115*)

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada masa pembangunan nasional jangka panjang kedua hukum adat masih perlu digali dan dikembangkan mengingat, hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang digali dari kebudayaan asli bangsa Indonesia. Sehingga perlu diadakan penelitian-penelitian terhadap hukum adat untuk menggali dan menemukan asas dan norma hukum yang pada akhirnya diharapkan dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional.

## Daftar Pustaka

1. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH., Pengkajian dan Pengembangan Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada *Sarasehan tentang Posisi dan Peran Materi Hukum dalam Perspektif Pelita VII*, di Polda Jateng, 6 Maret 1996
2. Hilman Hadikusumah,SH., Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1980.
3. IGN. Sugangga,SH., Pengantar Hukum Adat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
4. Prof. Iman Sudiyat,SH., Asas-Asas Hukum Adat (Bekal Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1981.
5. Prof. Dr. H. Moh. Koesnoe,SH., Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum (Bagian I), CV. Mandar Maju, Bandung, 1992.
6. Prof. Dr. H. Moh. Koesnoe,SH., Hubungan Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Pembangunan Nasional, Makalah disampaikan dalam *Simposium tentang Integrasi Hukum Adat ke dalam Hukum Nasional selama 50 tahun Terakhir*, BPHN-Dep. Kehakiman, Jakarta, 9-10 Januari 1995.
7. Prof. Mahadi,SH., Uraian Singkat tentang Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1991.
8. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo,SH., Hubungan Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Pembangunan Nasional, Makalah disampaikan dalam *Simposium tentang Integrasi Hukum Adat ke dalam Hukum Nasional selama 50 tahun Terakhir*, BPHN-Dep. Kehakiman, Jakarta, 9-10 Januari 1995.
9. Soerojo Wignjodipoero,SH., Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1993
10. Prof. Dr. R. Soepomo,SH., Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
11. Soleman B. Taneko,SH., Hukum Adat (Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang), Eresco, Bandung, 1987.